APBD TAHUN ANGGARAN 2026

2025

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NO. 5 , BD 2025/NO.62, 17 HLM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 29 Tahun 2024, UU No. 17 Tahun 2025, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2018, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, PerMendagri No. 52 Tahun 2012, PerMendagri No. 16 Tahun 2017, PerMendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PerMendagri No. 78 Tahun 2020, PerMendagri No. 77 Tahun 2020, PerMendagri No. 9 Tahun 2021,PerMendagri No. 14 Tahun 2025, Perda Kota Pangkal Pinang No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2024, Perda Kota Pangkal Pinang No. 12 Tahun 2022, Perda Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2024.

Dalam peraturan ini mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 memuat tentang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Catatan

- Ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 30 Desember 2025. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.